

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2020



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2020



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2020

---

|                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>ISSN</b>             | : | 2549-8789                      |
| <b>No. Publikasi</b>    | : | 72000.2130                     |
| <b>Katalog</b>          | : | 4601001.72                     |
| <b>Ukuran Buku</b>      | : | 14,8 x 21 cm                   |
| <b>Jumlah Halaman</b>   | : | x + 51 Halaman                 |
| <b>Naskah</b>           | : | BPS Provinsi Sulawesi Tengah   |
| <b>Penyunting</b>       | : | BPS Provinsi Sulawesi Tengah   |
| <b>Gambar Kulit</b>     | : | BPS Provinsi Sulawesi Tengah   |
| <b>Diterbitkan Oleh</b> | : | © BPS Provinsi Sulawesi Tengah |
| <b>Sumber Ilustrasi</b> | : | BPS Provinsi Sulawesi Tengah   |
| <b>Dicetak oleh</b>     | : |                                |

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

# Tim Penyusun

## Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2020

**Pengarah :**

Drs. Simon Sapary, M.Sc.

**Penanggung Jawab :**

Mohamad Fadlian Syah, SST, M.Si.

**Editor :**

Gladius Alfonsus, SST.

**Penulis :**

Ahmad Risal, S.Tr.Stat.



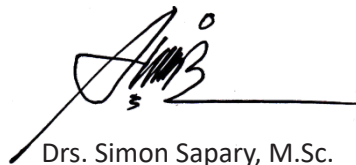
## KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2020” merupakan publikasi kedelapan yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua, pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada, dan kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, November 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Simon Sapary, M.Sc.



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | v  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                | 1  |
| 1.2. Tujuan .....                        | 4  |
| <b>BAB II METODOLOGI</b> .....           | 5  |
| 2.1. Ruang Lingkup .....                 | 5  |
| 2.2. Sumber Data .....                   | 5  |
| 2.3. Metode Pengumpulan Data .....       | 6  |
| <b>BAB III KONSEP DAN DEFINISI</b> ..... | 9  |
| 3.1. Statistik Politik .....             | 9  |
| 3.2. Indikator Statistik Politik.....    | 12 |
| 3.3. Statistik Keamanan .....            | 15 |
| 3.3.1. Kriminalitas .....                | 15 |
| 3.3.2. Penegakan Hukum.....              | 17 |
| 3.4. Indikator Statistik Keamanan.....   | 20 |
| <b>BAB IV STATISTIK POLITIK</b> .....    | 23 |
| 4.1. Pemilihan Kepala Daerah.....        | 23 |
| 4.2. Pemilu Legislatif 2019.....         | 30 |
| 4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 34 |
| 4.4. Organisasi Kemasyarakatan .....     | 38 |
| <b>BAB V STATISTIK KEAMANAN</b> .....    | 41 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 1.1.</b> Sumber Data .....  | 6  |
| <b>Tabel 2.1.</b> Instrumen Pengumpulan Data .....   | 7  |
| <b>Tabel 4.1.</b> Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir ....  | 25 |
| <b>Tabel 4.2.</b> Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan .....   | 26 |
| <b>Tabel 4.3.</b> Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah .....                             | 27 |
| <b>Tabel 4.4.</b> Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung .....              | 28 |
| <b>Tabel 4.5.</b> Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya .....                  | 29 |
| <b>Tabel 4.6.</b> Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019 .....  | 31 |
| <b>Tabel 4.7.</b> Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019 .....                              | 32 |
| <b>Tabel 4.8.</b> Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 .....                    | 33 |
| <b>Tabel 4.9.</b> Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2020   | 35 |
| <b>Tabel 4.10.</b> Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2020 .....                               | 36 |
| <b>Tabel 4.11.</b> Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 .....  | 37 |
| <b>Tabel 4.12.</b> Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 ..... | 39 |

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 5.1.</b> Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 .....   | 42 |
| <b>Tabel 5.2.</b> Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 .....   | 43 |
| <b>Tabel 5.3.</b> Jumlah Kejahatan ( <i>Crime Total</i> ) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2020 .....                    | 44 |
| <b>Tabel 5.4.</b> Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020.....            | 45 |
| <b>Tabel 5.5.</b> Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana ( <i>Crime Clock</i> ) Tahun 2018 – 2020 .....                     | 46 |
| <b>Tabel 5.6.</b> Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana ( <i>Crime Rate</i> ) Per 100.000 Penduduk Tahun 2018 – 2020 ..... | 47 |
| <b>Tabel 5.7.</b> Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2019 – 2020 .....              | 48 |
| <b>Tabel 5.8.</b> Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2020 .....                | 50 |
| <b>Tabel 5.9.</b> Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....                         | 51 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa **“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”**.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai

politik.

Pada Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 15 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014.

Pada Pemilu 2019, terdapat 27 partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU. Setelah melalui beberapa tahap, sebanyak 14 partai politik dinyatakan dapat ikut serta pada pemilu 2019.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 79 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

## **1.2. Tujuan**

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan ini bertujuan untuk:

- a. menghimpun data statistik politik dan keamanan,
- b. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- c. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

## BAB II

# METODOLOGI

### 2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2020 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2020. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya/ setelahnya.

### 2.2. Sumber Data

Data statistik politik dan keamanan bersumber dari data registrasi instansi terkait. Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

#### 2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Kepolisian Daerah (Polda);
- d. Sekretariat DPRD.



**2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :**

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polresta);
- d. Sekretariat DPRD.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah:

**Tabel 1.1. Sumber Data**

| Nama Instansi         | Bagian            | Data yang dapat diperoleh   |
|-----------------------|-------------------|---|
| (1)                   | (2)               | (3)   |
| Komisi Pemilihan Umum | Sub Bagian Teknis | Waktu pelaksanaan Pilkada, Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap, Perolehan suara, dan Partai pendukung pasangan calon                      |
|                       |                   | Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung |
| Pemerintah Daerah     | Bappeda           | Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan   |
|                       | Bakesbangpol      | LSM/Ormas   |
| Sekretariat Dewan     | Sekretariat       | Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur  |
|                       | Perundangan       | Produk perundangan yang dihasilkan dewan pemda  |
|                       | Kepegawaian       | Jumlah polisi menurut jenis kelamin   |
| Kepolisian            | Reskrim/ops       | Data Kriminal   |
|                       | Analisa Intelkam  | Data Demonstrasi  |

**2.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah

dan kemudahan pelaksanaan, disediakan instrumen pengumpulan data yang berupa kuesioner yang telah disusun di BPS RI.

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner dan pedoman pengisian kuesioner. Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan, penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

**Tabel 1.2.** Instrumen Pengumpulan Data

| No  | Jenis Instrumen             | Kegunaan  | Penanggung Jawab pengisian | Jumlah | Diperuntukkan                      |
|-----|-----------------------------|---|----------------------------|--------|------------------------------------|
| (1) | (2)                         | (3)   | (4)                        | (5)    | (6)                                |
| 1.  | POLKAM-2020 (KAB-KOTA)      | Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/ Kota | BPS Kab/Kota               | 3      | BPS Provinsi<br>Arsip BPS Kab/Kota |
| 2.  | POLKAM-2020 (PROV)          | Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi        | BPS Provinsi               | 2      | BPS RI<br>BPS Provinsi             |
| 3.  | Pedoman Pengisian Kuesioner | Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan           | Disusun Oleh BPS RI        | -      | Petugas Pengumpul Data             |



## BAB III

# KONSEP DAN DEFINISI

### 3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- h. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

- i. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:
- k. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
  - (a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - (b) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
  - (c) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - (d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - (e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - (f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);

- (g) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (h) Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- (i) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

### **3.2. Indikator Statistik Politik**

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/ Penduduk Sulawesi Tengah :

- a. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- b. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- c. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya  
 B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- d. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu  
 B = Jumlah penduduk yang memilih  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada  
 B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar  
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih



f. Rate suara tidak sah

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah Kartu Suara yang tidak sah

C = Jumlah Kartu seluruh pemilih

g. Statistik Partai Politik :

- Banyaknya partai politik
- Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

h. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

- Hasil perolehan suara menurut partai politik
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
- Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

i. Statistik dari kegiatan pemilukada;

- Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)

- Jumlah calon dalam pilkada
- Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

### 3.3. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan.

#### 3.3.1. Kriminalitas

##### Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
  - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
  - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
  - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
  - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
  - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

### **Pelaku Tindak Kriminalitas**

a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

### **Tahanan**

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

### **Kerugian**

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda

yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

### 3.3.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian

faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).

### **3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

#### **Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian**

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;
- c. pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

#### **Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :**

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

- c. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).
- d. Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol).

### **Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

### **Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian**

Proses penanganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan. Proses ini biasanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:
  - Pembuatan resume
  - Penyusunan isi berkas perkara
  - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

### **3.4. Indikator Statistik Keamanan**

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan :

- a. Angka Indeks Kejahatan (  $I_t$  )

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

$t_0$  = Tahun dasar

$t$  = Tahun  $t$

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate* =  $CR$ )

$$CR = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan Pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun  $t$  (*crime clock* =  $CC$ )

$$CC = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times 1 \text{ detik}$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance* =  $CE$ )

$$CE = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$





## BAB IV

# STATISTIK POLITIK

### 4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU No. 12/2008 tentang perubahan kedua UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat calon perseorangan untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen dimana jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Tabel 4.1. menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun gubernur. Pada tahun 2017 ada 2 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Buol. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 3 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Donggala. Pada tahun 2020 ada tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Sigi dan Banggai Laut serta satu kota yakni Kota Palu. Sedangkan

Jumlah pemilih dan yang menggunakan hak memilih ditampilkan pada Tabel 4.2. sementara banyaknya suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih. Pada tabel 4.3. menampilkan jumlah kandidat, perolehan suara, dan partai pengusung calon terpilih pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.5 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih.

**Tabel 4.1.** Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

| Wilayah              | Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah |
|----------------------|---|
| (1)                  | (2)                                       |
| <b>Kabupaten</b>     |   |
| 1. Banggai Kepulauan | 15 Februari 2017                          |
| 2. Banggai           | 9 Desember 2020                           |
| 3. Morowali          | 27 Juni 2018                              |
| 4. Poso              | 9 Desember 2020                           |
| 5. Donggala          | 27 Juni 2018                              |
| 6. Tolitoli          | 9 Desember 2020                           |
| 7. Buol              | 15 Februari 2017                          |
| 8. Parigi Moutong    | 27 Juni 2018                              |
| 9. Tojo Una-una      | 9 Desember 2020                           |
| 10. Sigi             | 9 Desember 2020                           |
| 11. Banggai Laut     | 9 Desember 2020                           |
| 12. Morowali Utara   | 9 Desember 2020                           |
| <b>Kota</b>          |   |
| 13. Palu             | 9 Desember 2020                           |
| <b>Provinsi</b>      |   |
| 14. Sulawesi Tengah  | 9 Desember 2020                           |

Sumber: KPUD

**Tabel 4.2.** Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan

| Kabupaten/Kota         | Pemilukada Gubernur      |                                   | Pemilukada Bupati/<br>Walikota |                                   |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Jumlah Pemilih Terdaftar | Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih | Jumlah Pemilih Terdaftar       | Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih |
| (1)                    | (2)                      | (3)                               | (4)                            | (5)                               |
| 1. Banggai Kepulauan   | 85 017                   | 63 202                            | 80 173                         | 68 322                            |
| 2. Banggai             | 252 932                  | 205 425                           | 252 932                        | 205 319                           |
| 3. Morowali            | 112 670                  | 58 408                            | 888 888                        | 74 187                            |
| 4. Poso                | 162 142                  | 127 168                           | 162 141                        | 127 484                           |
| 5. Donggala            | 206 954                  | 144 891                           | 198 004                        | 154 648                           |
| 6. Tolitoli            | 154 929                  | 128 239                           | 154 893                        | 128 202                           |
| 7. Buol                | 101 362                  | 69 795                            | 97 434                         | 78 039                            |
| 8. Parigi Moutong      | 297 271                  | 216 023                           | 298 004                        | 223 771                           |
| 9. Tojo Una-una        | 118 230                  | 95 143                            | 118 207                        | 95 282                            |
| 10. Sigi               | 176 020                  | 142 853                           | 175 893                        | 142 563                           |
| 11. Banggai Laut       | 48 810                   | 41 442                            | 48 786                         | 41 411                            |
| 12. Morowali Utara     | 86 879                   | 69 075                            | 87 334                         | 69 743                            |
| 13. Palu               | 260 751                  | 163 907                           | 260 293                        | 163 380                           |
| <b>Sulawesi Tengah</b> | <b>2 063 967</b>         | <b>1 525 571</b>                  | <b>2 822 982</b>               | <b>1 572 351</b>                  |

Sumber: KPU

**Tabel 4.3.** Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah

| Kabupaten/Kota       | Pemilukada Gubernur |                 |                             | Bupati/Walikota |                 |                             |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|                      | Suara Sah           | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan Hak Pilih | Suara Sah       | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan Hak Pilih |
| (1)                  | (2)                 | (3)             | (4)                         | (5)             | (6)             | (7)                         |
| 1. Banggai Kepulauan | 62 314              | 888             | 21 815                      | 67 813          | 509             | 11 851                      |
| 2. Banggai           | 199 464             | 5 961           | 47 507                      | 201 455         | 3 864           | 47 613                      |
| 3. Morowali          | 56 785              | 1 623           | 54 262                      | 73 673          | 514             | 14 701                      |
| 4. Poso              | 124 897             | 2 271           | 34 974                      | 125 339         | 2 145           | 34 657                      |
| 5. Donggala          | 142 976             | 1 915           | 62 063                      | 153 094         | 1 554           | 43 356                      |
| 6. Tolitoli          | 125 327             | 2 912           | 26 690                      | 125 946         | 2 256           | 26 691                      |
| 7. Buol              | 68 755              | 1 040           | 31 567                      | 77 457          | 582             | 19 395                      |
| 8. Parigi Moutong    | 213 645             | 2 378           | 81 248                      | 221 410         | 2 361           | 74 233                      |
| 9. Tojo Una-una      | 92 993              | 2 150           | 23 087                      | 93 366          | 1 919           | 22 922                      |
| 10. Sigi             | 139 206             | 3 647           | 33 167                      | 139 162         | 3 401           | 33 330                      |
| 11. Banggai Laut     | 40 707              | 735             | 7 368                       | 40 639          | 772             | 7 375                       |
| 12. Morowali Utara   | 67 099              | 1 976           | 17 804                      | 67 989          | 1 754           | 17 591                      |
| 13. Palu             | 161 199             | 2 708           | 96 844                      | 160 266         | 3 114           | 96 913                      |
| Sulawesi Tengah      | 1 495 367           | 30 204          | 538 396                     | 1 547 609       | 24 745          | 450 628                     |

Sumber: KPUD

**Tabel 4.4.** Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

| Wilayah              | Jumlah Kandidat | Perolehan Suara Sah Calon Terpilih |            | Partai Pengusung Calon Terpilih                               |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------|---|
|                      |                 | Jumlah                             | Persentase |   |
| (1)                  | (2)             | (3)                                | (4)        | (5)   |
| 1. Banggai Kepulauan | 4               | 26 677                             | 39,34      | Hanura, PBB, Demokrat, PKS                                    |
| 2. Banggai           | 3               | 88 011                             | 43,69      | Nasdem, Golkar, PKB, Hanura                                   |
| 3. Morowali          | 5               | 26 325                             | 35,73      | Golkar, PKS, Nasdem, Hanura                                   |
| 4. Poso              | 3               | 61 326                             | 48,93      | Demokrat, Hanura, PAN, Perindo                                |
| 5. Donggala          | 4               | 53 042                             | 34,65      | Gerindra, PAN, Nasdem, PPP, PKS                               |
| 6. Tolitoli          | 3               | 55 960                             | 44,43      | PBB, PAN, NASDEM  |
| 7. Buol              | 3               | 36 108                             | 46,62      | Golkar, PAN, PDIP, Hanura                                     |
| 8. Parigi Moutong    | 3               | 99 048                             | 44,74      | Gerindra, PPP, PBB, PDIP, PAN, PKS                            |
| 9. Tojo Una-una      | 4               | 33 822                             | 36,23      | NASDEM, Golkar  |
| 10. Sigi             | 2               | 77 375                             | 55,60      | PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, PBB                              |
| 11. Banggai Laut     | 4               | 14 107                             | 34,71      | Hanura, PKS   |
| 12. Morowali Utara   | 2               | 34 335                             | 50,50      | PBB, Hanura, Nasdem, PKB, Golkar                              |
| 13. Palu             | 4               | 64 249                             | 40,09      | Hanura, PKB   |
| 14. Sulawesi Tengah  | 2               | 891 334                            | 58,43      | PKS, NASDEM, Hanura, PKB, Golkar, Perindo, PAN, PPP, Demokrat |

Sumber: KPUD

**Tabel 4.5.** Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya

| Wilayah              | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Usia | Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya |
|----------------------|---------------|---------------------|------|------------------------------|
| (1)                  | (2)           | (3)                 | (4)  | (5)                          |
| 1. Banggai Kepulauan | Laki-laki     | SMA                 | 48   | Politisi                     |
| 2. Banggai           | Laki-laki     | S1                  | 50   | Swasta/Lain-lain             |
| 3. Morowali          | Laki-laki     | S1                  | 52   | DPRD Morowali                |
| 4. Poso              | Perempuan     | Profesi             | 38   | Anggota DPR-RI               |
| 5. Donggala          | Laki-laki     | S1                  | 58   | Bupati Donggala              |
| 6. Tolitoli          | Laki-laki     | SMA                 | 53   | Anggota DPRD Kabupaten/Kota  |
| 7. Buol              | Laki-laki     | S2                  | 59   | Bupati Buol                  |
| 8. Parigi Moutong    | Laki-laki     | AKABRI              | 61   | Bupati Parigi Moutong        |
| 9. Tojo Una-una      | Laki-laki     | S2                  | 60   | Bupati Tojo Una-Una          |
| 10. Sigi             | Laki-laki     | S2                  | 53   | Bupati Sigi                  |
| 11. Banggai Laut     | Laki-laki     | S1                  | 55   | Swasta/Lain-lain             |
| 12. Morowali Utara   | Laki-laki     | S3                  | 45   | Swasta/Lain-lain             |
| 13. Palu             | Laki-laki     | S1                  | 46   | Swasta/Lain-lain             |
| 14. Sulawesi Tengah  | Laki-laki     | SMA                 | 71   | Swasta/Lain-lain             |

Sumber: KPUD



## **4.2. Pemilu Legislatif 2019**

Untuk ketiga kalinya, pada pemilu legislatif 2019 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 17 April 2019 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.955.936 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 79,08 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.637.411 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 87.087 suara tidak sah.

Partai Nasional Demokrat menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 222.788 suara (14,33 persen). Diikuti Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah perolehan suara 202.753 suara (13,04 persen) dan Partai Gerindra di urutan ketiga dengan perolehan suara 198.990 (12,80 persen).

Dari 16 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya sebelas belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Nasional Demokrat dan Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak, sebanyak tujuh kursi. Selanjutnya diikuti oleh Partai Gerindra dan PDI-P yang memperoleh masing-masing 6 kursi.

**Tabel 4.6.** Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

| Kabupaten/Kota         | Pemilu Legislatif 2019 |                                |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                        | Penduduk Terdaftar     | Penduduk Menggunakan Hak Pilih |
| (1)                    | (2)                    | (3)                            |
| 1. Banggai Kepulauan   | 80 778                 | 70 062                         |
| 2. Banggai             | 268 386                | 204 922                        |
| 3. Morowali            | 103 478                | 80 903                         |
| 4. Poso                | 156 266                | 130 791                        |
| 5. Donggala            | 210 747                | 165 915                        |
| 6. Tolitoli            | 160 699                | 127 176                        |
| 7. Buol                | 101 765                | 83 592                         |
| 8. Parigi Moutong      | 312 435                | 244 573                        |
| 9. Tojo Una-una        | 118 337                | 93 690                         |
| 10. Sigi               | 174 985                | 143 271                        |
| 11. Banggai Laut       | 47 623                 | 40 254                         |
| 12. Morowali Utara     | 86 340                 | 69 451                         |
| 13. Palu               | 248 619                | 182 894                        |
| <b>Sulawesi Tengah</b> | <b>2 070 458</b>       | <b>1 637 411</b>               |

Sumber: KPUD

**Tabel 4.7.** Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

| Kabupaten/Kota       | Pemilu Legislatif 2019 |                 |                             |
|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                      | Suara Sah              | Suara Tidak Sah | Tidak Menggunakan Hak Pilih |
| (1)                  | (2)                    | (3)             | (4)                         |
| 1. Banggai Kepulauan | 67 869                 | 2 710           | 10 716                      |
| 2. Banggai           | 191 379                | 13 458          | 63 549                      |
| 3. Morowali          | 76 745                 | 4 160           | 22 573                      |
| 4. Poso              | 125 391                | 5 400           | 25 475                      |
| 5. Donggala          | 155 814                | 10 101          | 44 382                      |
| 6. Tolitoli          | 119 425                | 7 751           | 33 523                      |
| 7. Buol              | 78 054                 | 5 538           | 18 173                      |
| 8. Parigi Moutong    | 232 765                | 11 808          | 67 862                      |
| 9. Tojo Una-una      | 89 898                 | 3 792           | 24 647                      |
| 10. Sigi             | 136 337                | 6 934           | 31 714                      |
| 11. Banggai Laut     | 38 626                 | 1 628           | 7 369                       |
| 12. Morowali Utara   | 65 794                 | 3 657           | 16 889                      |
| 13. Palu             | 172 744                | 10 150          | 65 725                      |
| Sulawesi Tengah      | 1 550 324              | 87 087          | 432 597                     |

Sumber: KPUD

**Tabel 4.8.** Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

| Partai                                 | Jumlah Perolehan |              |
|--|------------------|--------------|
|  | Suara            | Jumlah Kursi |
| (1)                                    | (2)              | (3)          |
| 1. Partai Nasional Demokrat            | 222 788          | 7            |
| 2. Partai Kebangkitan Bangsa           | 105 562          | 4            |
| 3. Partai Keadilan Sejahtera           | 97 610           | 4            |
| 4. Partai PDIP                         | 165 867          | 6            |
| 5. Partai Golongan Karya               | 202 753          | 7            |
| 6. Partai Gerakan Indonesia Raya       | 198 990          | 6            |
| 7. Partai Demokrat                     | 119 189          | 4            |
| 8. Partai Amanat Nasional              | 102 699          | 2            |
| 9. Partai Persatuan Pembangunan        | 54 084           | 1            |
| 10. Partai Hati Nurani Rakyat          | 88 166           | 2            |
| 11. Partai Bulan Bintang               | 34 270           | 0            |
| 12. Partai Keadilan dan Persatuan      | 4 692            | 0            |
| 13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 11 301           | 0            |
| 14. Partai Berkarya                    | 49 749           | 0            |
| 13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 73 203           | 2            |
| 13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 23 349           | 0            |
| <b>Sulawesi Tengah</b>                 | <b>1 554 272</b> | <b>45</b>    |

Sumber: KPUD

### **4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Sejak 2004, seluruh anggota DPRD dipilih berdasarkan hasil pemilu.

Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DCT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DCT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin dan asal partai ditampilkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Sedangkan Tabel 4.11 menampilkan jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

**Tabel 4.9.** Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2020

| Wilayah              | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| (1)                  | (2)       | (3)       | (4)   |
| 1. Banggai Kepulauan | 21        | 4         | 25    |
| 2. Banggai           | 25        | 10        | 35    |
| 3. Morowali          | 24        | 1         | 25    |
| 4. Poso              | 24        | 6         | 30    |
| 5. Donggala          | 26        | 4         | 30    |
| 6. Tolitoli          | 24        | 6         | 30    |
| 7. Buol              | 21        | 4         | 25    |
| 8. Parigi Moutong    | 34        | 6         | 40    |
| 9. Tojo Una-una      | 24        | 1         | 25    |
| 10. Sigi             | 25        | 5         | 30    |
| 11. Banggai Laut     | 16        | 4         | 20    |
| 12. Morowali Utara   | 18        | 7         | 25    |
| 13. Palu             | 31        | 4         | 35    |
| 14. Sulawesi Tengah  | 33        | 12        | 45    |

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.10.** Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2020

| Partai  | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|---|---------------|-----------|-----------|
|   | Laki-Laki     | Perempuan |           |
| (1)   | (2)           | (3)       | (4)       |
| 1. Partai Golongan Karya                          | 7             | 0         | 7         |
| 2. Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P) | 5             | 1         | 6         |
| 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)              | 6             | 1         | 7         |
| 4. Partai Demokrat                                | 2             | 2         | 4         |
| 5. Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)     | 4             | 2         | 6         |
| 6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)             | 1             | 1         | 2         |
| 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                | 3             | 1         | 4         |
| 8. Partai Amanat Nasional (PAN)                   | 1             | 0         | 1         |
| 9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                | 1             | 3         | 4         |
| 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)            | 0             | 1         | 1         |
| 11. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)          | 2             | 0         | 2         |
| <b>Sulawesi Tengah</b>                            | <b>32</b>     | <b>12</b> | <b>44</b> |

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 4.11.** Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten Tahun 2020

| Kabupaten/Kota       | Perda yang disahkan tahun 2020 |
|----------------------|--------------------------------|
| (1)                  | (2)                            |
| 1. Banggai Kepulauan | 8                              |
| 2. Banggai           | 5                              |
| 3. Morowali          | 4                              |
| 4. Poso              | 4                              |
| 5. Donggala          | 0                              |
| 6. Tolitoli          | 2                              |
| 7. Buol              | 10                             |
| 8. Parigi Moutong    | 8                              |
| 9. Tojo Una-una      | 3                              |
| 10. Sigi             | 6                              |
| 11. Banggai Laut     | 10                             |
| 12. Morowali Utara   | 9                              |
| 13. Palu             | 4                              |
| 14. Sulawesi Tengah  | 0                              |

Sumber: Sekretariat DPRD



#### **4.4. Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten Tahun 2018-2020. Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa jumlah peningkatan jumlah Ormas, secara umum terus bertambah dari tahun ketahun.

Jumlah Ormas terbanyak yang mendaftar setiap tahun berada pada Kabupaten Buol dan Kota Palu. Pada tahun 2020, jumlah ormas yang baru mendaftar pada dua kabupaten/kota tersebut sebanyak 23 dan 10 Ormas. Sedangkan untuk Kabupaten yang memiliki penambahan jumlah ormas paling sedikit berada pada Kabupaten Banggai, Donggala, Toli-toli dan Parigi Moutong. Tidak terjadi penambahan Ormas pada dua kabupaten tersebut.

**Tabel 4.12.** Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar Menurut Wilayah Tahun 2018-2020

| Wilayah              | Mendaftar Tahun |      |      |
|----------------------|-----------------|------|------|
|                      | 2018            | 2019 | 2020 |
| (1)                  | (2)             | (3)  | (4)  |
| 1. Banggai Kepulauan | 1               | 2    | 3    |
| 2. Banggai           | 3               | 1    | 0    |
| 3. Morowali          | 3               | 2    | 5    |
| 4. Poso              | 0               | 0    | 5    |
| 5. Donggala          | 0               | 0    | 0    |
| 6. Tolitoli          | 3               | 13   | 0    |
| 7. Buol              | 0               | 3    | 23   |
| 8. Parigi Moutong    | 1               | 0    | 0    |
| 9. Tojo Una-una      | 1               | 6    | 2    |
| 10. Sigi             | 7               | 1    | 3    |
| 11. Banggai Laut     | 2               | 26   | 1    |
| 12. Morowali Utara   | 7               | 3    | 7    |
| 13. Palu             | 25              | 21   | 10   |
| 14. Sulawesi Tengah  | 19              | 20   | 0    |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah



## BAB V

# STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi dua belas kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Banggai Laut. Untuk pelayanan tingkat Polres, warga Kabupaten Banggai Laut masih dilayani oleh kantor Polres Banggai Kepulauan. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Poso sebanyak 12 pos polisi.

Data Jumlah Polisi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2. Sebagian besar polisi memiliki jenis kelamin laki-laki. Jumlah polisi terbanyak dengan jenis kelamin laki-laki berada pada Kota Palu (653 orang) dan untuk jenis kelamin perempuan, terbanyak pada Kabupaten Banggai (33 Orang). Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) menurut kabupaten/kota tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3. Jumlah kejahatan terbanyak berada pada Kota Palu dan Kabupaten Banggai dengan kejahatan sebanyak 1.691 dan 1.198 Kejahatan.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Tojo Una-una.

Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

| Wilayah                | Polres/<br>Polresta | Polsek/<br>Polsekta | Pos Polisi |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| (1)                    | (2)                 | (3)                 | (4)        |
| 1. Banggai Kepulauan   | 1                   | 5                   | 5          |
| 2. Banggai             | 1                   | 10                  | 10         |
| 3. Morowali            | 1                   | 6                   | 0          |
| 4. Poso                | 1                   | 12                  | 12         |
| 5. Donggala            | 1                   | 8                   | 0          |
| 6. Tolitoli            | 1                   | 10                  | 10         |
| 7. Buol                | 1                   | 5                   | 5          |
| 8. Parigi Moutong      | 1                   | 9                   | 9          |
| 9. Tojo Una-una        | 1                   | 7                   | 7          |
| 10. Sigi               | 1                   | 5                   | 5          |
| 11. Banggai Laut       | 0                   | 2                   | 2          |
| 12. Morowali Utara     | 1                   | 5                   | 5          |
| 13. Palu               | 1                   | 5                   | 5          |
| <b>Sulawesi Tengah</b> | <b>12</b>           | <b>88</b>           | <b>75</b>  |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

| Wilayah              | Jumlah Polisi |           | Total |
|----------------------|---------------|-----------|-------|
|                      | Laki-Laki     | Perempuan |       |
| (1)                  | (2)           | (3)       | (4)   |
| 1. Banggai Kepulauan | 290           | 7         | 297   |
| 2. Banggai           | 614           | 33        | 647   |
| 3. Morowali          | 238           | 7         | 245   |
| 4. Poso              | 605           | 10        | 615   |
| 5. Donggala          | 437           | 7         | 444   |
| 6. Tolitoli          | 401           | 12        | 413   |
| 7. Buol              | 297           | 2         | 299   |
| 8. Parigi Moutong    | 583           | 24        | 607   |
| 9. Tojo Una-una      | 332           | 5         | 337   |
| 10. Sigi             | 553           | 30        | 583   |
| 11. Banggai Laut     | 80            | 1         | 81    |
| 12. Morowali Utara   | 332           | 10        | 342   |
| 13. Palu             | 653           | 32        | 685   |
| 14. Sulawesi Tengah  | 8 096         | 334       | 8 430 |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

**Tabel 5.3.** Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Menurut Wilayah Tahun 2018-2020

| Wilayah              | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| (1)                  | (2)   | (3)   | (4)   |
| 1. Banggai Kepulauan | 197   | 398   | 375   |
| 2. Banggai           | 1 272 | 1 361 | 1 198 |
| 3. Morowali          | 531   | 607   | 310   |
| 4. Poso              | 796   | 689   | 122   |
| 5. Donggala          | 771   | 505   | 571   |
| 6. Tolitoli          | 314   | 282   | 211   |
| 7. Buol              | 575   | 567   | 511   |
| 8. Parigi Moutong    | 611   | 532   | 480   |
| 9. Tojo Una-una      | 379   | 289   | 172   |
| 10. Sigi             | 884   | 846   | 585   |
| 11. Banggai Laut*    | -     | -     | -     |
| 12. Morowali Utara   | 531   | 607   | 185   |
| 13. Palu             | 3 623 | 1 589 | 1 691 |
| 14. Sulawesi Tengah  | 8 768 | 7 381 | 5 448 |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.4.** Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Wilayah Tahun 2019-2020

| Wilayah              | Jumlah Kejahatan |         |       |         |
|----------------------|------------------|---------|-------|---------|
|                      | 2019             |         | 2020  |         |
|                      | Lapor            | Selesai | Lapor | Selesai |
| (1)                  | (2)              | (3)     | (4)   | (5)     |
| 1. Banggai Kepulauan | 398              | 227     | 375   | 224     |
| 2. Banggai           | 1 361            | 772     | 1 198 | 768     |
| 3. Morowali          | 607              | 297     | 310   | 163     |
| 4. Poso              | 656              | 395     | 122   | 86      |
| 5. Donggala          | 505              | 298     | 571   | 254     |
| 6. Tolitoli          | 282              | 180     | 211   | 113     |
| 7. Buol              | 567              | 329     | 511   | 322     |
| 8. Parigi Moutong    | 532              | 243     | 480   | 286     |
| 9. Tojo Una-una      | 289              | 200     | 172   | 150     |
| 10. Sigi             | 846              | 482     | 585   | 114     |
| 11. Banggai Laut*    | -                | -       | -     | -       |
| 12. Morowali Utara   | 607              | 387     | 185   | 110     |
| 13. Palu             | 1 589            | 1 038   | 1 691 | 1 031   |
| 14. Sulawesi Tengah  | 7 381            | 5 619   | 5 448 | 3 666   |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya



**Tabel 5.5.** Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana  
(*Crime Clock*) Tahun 2018 – 2020

| Wilayah              | 2018      | 2019      | 2020      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                  | (2)       | (3)       | (4)       |
| 1. Banggai Kepulauan | 44°28'1"  | 22°0'36"  | 23°21'36" |
| 2. Banggai           | 6°50'18"  | 6°9'6"    | 7°18'43"  |
| 3. Morowali          | 16°29'49" | 14°25'53" | 28°15'29" |
| 4. Poso              | 11°19'4"  | 13°32'21" | 71°48'11" |
| 5. Donggala          | 11°21'42" | 17°20'47" | 15°20'29" |
| 6. Tolitoli          | 24°32'16" | 36°30'0"  | 41°30'59" |
| 7. Buol              | 15°14'5"  | 15°26'59" | 17°8'34"  |
| 8. Parigi Moutong    | 14°20'13" | 16°27'58" | 18°15'0"  |
| 9. Tojo Una-una      | 23°6'48"  | 30°18'41" | 50°55'48" |
| 10. Sigi             | 9°54'34"  | 10°21'16" | 14°58'27" |
| 11. Banggai Laut*    | -         | -         | -         |
| 12. Morowali Utara   | 16°29'49" | 14°25'53" | 47°23'4"  |
| 13. Palu             | 2°25'4"   | 7°14'1"   | 5°10'49"  |
| 14. Sulawesi Tengah  | 0°59'56"  | 1°22'15"  | 1°36'28"  |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan: ° jam  
 ' menit  
 " detik  
 \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.6.** Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Per 100.000 Penduduk Tahun 2018 – 2020

| Wilayah              | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|
| (1)                  | (2)  | (3)  | (4)  |
| 1. Banggai Kepulauan | 167  | 336  | 312  |
| 2. Banggai           | 345  | 378  | 330  |
| 3. Morowali          | 445  | 500  | 191  |
| 4. Poso              | 308  | 252  | 49   |
| 5. Donggala          | 256  | 166  | 190  |
| 6. Tolitoli          | 153  | 102  | 93   |
| 7. Buol              | 362  | 350  | 351  |
| 8. Parigi Moutong    | 127  | 108  | 109  |
| 9. Tojo Una-una      | 249  | 188  | 104  |
| 10. Sigi             | 373  | 353  | 227  |
| 11. Banggai Laut*    | -    | -    | -    |
| 12. Morowali Utara   | 423  | 473  | 153  |
| 13. Palu             | 940  | 309  | 453  |
| 14. Sulawesi Tengah  | 291  | 209  | 182  |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.7.** Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2019 – 2020

| Wilayah              | Jenis Tindak Pidana |      |           |      |                     |      |
|----------------------|---------------------|------|-----------|------|---------------------|------|
|                      | Pembunuhan          |      | Perkosaan |      | Penganiayaan Ringan |      |
|                      | 2019                | 2020 | 2019      | 2020 | 2019                | 2020 |
| (1)                  | (2)                 | (3)  | (4)       | (5)  | (6)                 | (7)  |
| 1. Banggai Kepulauan | 2                   | 3    | 6         | 5    | -                   | -    |
| 2. Banggai           | 6                   | 3    | 5         | 9    | 282                 | 194  |
| 3. Morowali          | -                   | -    | -         | -    | -                   | 48   |
| 4. Poso              | -                   | -    | 11        | -    | -                   | -    |
| 5. Donggala          | -                   | 3    | -         | 3    | -                   | -    |
| 6. Tolitoli          | 3                   | -    | -         | -    | 33                  | 29   |
| 7. Buol              | -                   | -    | 3         | 4    | 111                 | 106  |
| 8. Parigi Moutong    | 6                   | 4    | 3         | 5    | 132                 | 91   |
| 9. Tojo Una-una      | -                   | 1    | 1         | 3    | 50                  | 38   |
| 10. Sigi             | 4                   | 6    | 1         | 5    | 117                 | 121  |
| 11. Banggai Laut*    | -                   | -    | -         | -    | -                   | -    |
| 12. Morowali Utara   | 2                   | 1    | -         | -    | 87                  | 29   |
| 13. Palu             | 2                   | 2    | 7         | 2    | 149                 | 137  |
| 14. Sulawesi Tengah  | 30                  | 15   | 39        | 40   | 988                 | 798  |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Lanjutan Tabel 5.7. (lanjutan)

| Wilayah              | Jenis Tindak Pidana |      |            |      |
|----------------------|---------------------|------|------------|------|
|                      | Penganiayaan Berat  |      | Penculikan |      |
|                      | 2019                | 2020 | 2019       | 2020 |
| (1)                  | (2)                 | (3)  | (4)        | (5)  |
| 1. Banggai Kepulauan | 126                 | 116  | -          | -    |
| 2. Banggai           | -                   | -    | -          | -    |
| 3. Morowali          | -                   | -    | -          | -    |
| 4. Poso              | 98                  | -    | -          | 1    |
| 5. Donggala          | 5                   | 3    | -          | -    |
| 6. Tolitoli          | -                   | -    | -          | -    |
| 7. Buol              | 0                   | 1    | -          | -    |
| 8. Parigi Moutong    | 6                   | 4    | -          | -    |
| 9. Tojo Una-una      | -                   | -    | -          | -    |
| 10. Sigi             | -                   | -    | -          | -    |
| 11. Banggai Laut*    | -                   | -    | -          | -    |
| 12. Morowali Utara   | 4                   | -    | -          | -    |
| 13. Palu             | -                   | -    | -          | -    |
| 14. Sulawesi Tengah  | 37                  | 72   | -          | -    |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

**Tabel 5.8.** Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2020

| Wilayah              | Jenis Tindak Pidana |     |      |     |     |     |     |
|----------------------|---------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|                      | 1                   | 2   | 3    | 4   | 5   | 6   | 7   |
| (1)                  | (2)                 | (3) | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Banggai Kepulauan | -                   | 7   | 94   | 1   | 27  | 38  | 1   |
| 2. Banggai           | -                   | 110 | 91   | 9   | 111 | 131 | 48  |
| 3. Morowali          | -                   | 12  | 38   | -   | 14  | 13  | 47  |
| 4. Poso              | -                   | -   | -    | 37  | -   | 3   | -   |
| 5. Donggala          | 1                   | 1   | 165  | 2   | 26  | 11  | 38  |
| 6. Tolitoli          | -                   | 2   | 84   | 5   | 10  | 14  | 29  |
| 7. Buol              | -                   | 10  | 75   | -   | 8   | 30  | 13  |
| 8. Parigi Moutong    | 4                   | 3   | 114  | 2   | 31  | 16  | 36  |
| 9. Tojo Una-una      | -                   | -   | 71   | -   | 15  | 6   | 3   |
| 10. Sigi             | -                   | 25  | 178  | 9   | 37  | 11  | -   |
| 11. Banggai Laut*    | -                   | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
| 12. Morowali Utara   | 1                   | 2   | 30   | -   | 18  | 20  | 9   |
| 13. Palu             | 1                   | 79  | 375  | 80  | 61  | 47  | 375 |
| 14. Sulawesi Tengah  | 1                   | 321 | 1061 | 118 | 272 | 319 | 500 |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : \* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

- 1 Pembakaran dengan sengaja
- 2 Pencurian dengan pemberatan
- 3 Pencurian biasa
- 4 Pencurian dengan kekerasan
- 5 Penggelapan
- 6 Penipuan/Perbuatan Curang
- 7 Pencurian Kendaraan Bermotor

**Tabel 5.9.** Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

| Jenis Tindak Pidana             | Jumlah Kejadian |
|---------------------------------|-----------------|
| (1)                             | (2)             |
| 1. Pencurian                    | 2 331           |
| 2. Penganiayaan Ringan          | 1 591           |
| 3. Pencurian Kendaraan Bermotor | 1 099           |
| 4. Penipuan/Perbuatan Curang    | 659             |
| 5. Penggelapan                  | 630             |
| 6. Narkotika dan Psicotropika   | 611             |
| 7. Pencurian dengan Pemberatan  | 572             |
| 8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 471             |
| 9. Pencurian dengan Kekerasan   | 263             |
| 10. Pencabulan                  | 235             |

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No.48 Palu 94114  
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612  
Wevsite: <http://sulteng.bps.go.id>, email: [bps7200@bps.go.id](mailto:bps7200@bps.go.id)

ISSN 2549-8789



9 772549 878952